



RENCANA KERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BLITAR

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR
Jl. DR Moh. Hatta 05 Kota Blitar
telp/faks : 0342-807805
situs web : <http://diskominfotik.blitarkota.go.id>
e-mail : diskominfotik@blitarkota.go.id



DAFTAR ISI

	Halaman	
DAFTAR ISI	1	
DAFTAR TABEL	2	
KATA PENGANTAR	3	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN LALU	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2021 Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	29
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	31
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	35
2.5	Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN	46
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2	Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	52
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2021	55
4.1	Rencana Program Kerja Tahun 2021	55
4.2	Rencana Kegiatan Tahun 2021	55
BAB V	PENUTUP	61



DAFTAR TABEL

		Halaman
2.1	Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1 Tahun 2021	7
2.2	Jumlah Aplikasi Layanan Publik dan Layanan Pemerintahan	7
2.3	Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 2 Tahun 2021	9
2.4	Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3 Tahun 2021	10
2.5	Perangkat Daerah Yang mempublikasikan Data pada Aplikasi a-data	10
2.6	Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 4 Tahun 2018	12
2.7	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja PD dan Pencapaian Rencana Strategis PD s/d Tahun 2022	13
2.8	Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2021	29
2.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021	29
2.10	Tabel Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2021	30
2.11	Identifikasi Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	31
2.12	Identifikasi Isu Strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar	33
2.13	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	37
2.14	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021	44
3.1	Pembagian Urusan Pemerintah	46
3.2	Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2022	53
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2021	56



KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar tahun 2022 dapat diselesaikan.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar tahun 2021.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada tahun 2022, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kota Blitar yang sejahtera dan lebih baik.

Blitar, 02 Maret 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik
Kota Blitar

MUJIANTO, S.Sos, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19720214 199201 1 003



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Rencana Kerja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menterjemahkan Rencana Strategis (Rencana Strategis) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar.

Bahwa sesuai Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam penyusunannya, Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar tahun 2022 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2021. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja tahun 2022 ini juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan periode sebelumnya serta mempertimbangkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Diharapkan dengan penyusunan Rencana Kerja ini akan tersusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Kerja juga dimaksudkan sebagai parameter dalam memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar sekaligus sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
6. Peraturan kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
 12. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
 13. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2017 – 2021;
 14. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan program-program pembangunan daerah dan mewujudkan konsistensi dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan capaian kinerja pelayanan tahun lalu.
2. Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah.
3. Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
4. Tercapainya target sasaran pelayanan perangkat daerah dengan menggunakan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika;

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK, berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun lalu dan capaian Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, review terhadap rancangan awal Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, serta penelaahan usulan program masyarakat;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK menguraikan telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK, menguraikan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2021 disertai dengan pendanaan, serta lokasi;

BAB V PENUTUP, kesimpulan dengan menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2021;

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2021 Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dapat diketahui dari pengukuran kinerja dan pengukuran keuangan pada tahun sebelumnya. Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (*output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (*outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021

Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021			Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran	
					K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Vol	Satuan							
Komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	100	%	6.342.149.515	100	6.427.480.222	100	6.427.480.222	100	
				Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan		%		100		100		100	
				Tingkat Partisipasi Daerah dalam Agenda Kota									

				Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran		%	100		100		100	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun		jenis	8	51.288.600	8	42.099.600	100	82,18
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun.	10	jenis	25.200.000	23.999.900	5	15.391.300	83,3	64,13
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun	7	jenis	17.328.500,00	27.228.700,00	2	26.708.300,00	100	98,09
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan yang disusun		jenis		3.830.501.408	3	3.653.231.082	100	95,37

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	2	jenis	3.968.140,500	2	3.823.461,408	2	3.646.301,082	100	95,37
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran	Jumlah jenis laporan Keuangan yang tersusun	4	laporan	51.975.000	4	7.040.000	4	6.930.000	100	98,44
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang dilakukan pembinaan		%		100	1.241.995.300	100	1.011.301.440	100	81,43
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu yang terpenuhi	50	stel	17.500.000	50	19.800.000	50	19.520.000	100	98,59
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4	jenis	60.504.650	4					
				Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	4	jenis		6	1.222.195.300	6	991.781.440	100	81,15
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan sarana prasarana perkantoran		jenis		7	306.674.200	7	283.362.242	100	92,4

			Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	16	jenis	17.654.700	16	16.814.000	16	16.450.000	100	97,84
			Penyediaan peralatan rumah tangga	penyediaan peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	19	jenis	34.576.500	8	44.022.500	8	39.599.500	100	89,95
			Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah dos/kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	1450	dos		1240	47.966.300	1240	47.869.650	100	99,8
				Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	44	jenis	66287970	49	15.165.100	49	15.039.600	100	98,38
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	5	jenis		4	6.997.300	4	5.459.000	100	78,02
				Jumlah lembar penggandaan	15000	lbr	14.395.080	12.300		12.300		100	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3	eksepler	9.765.000	3	9.300.000	3	3.960.000	100	42,58

			Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang tercukupi	37	Perjalanan dinas	220.500.000	32	166.409.000	32	154.984.492	100	93,13
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah jenis layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terbayarkan	49	jenis	424620000	4	272.159.349	4	263.612.998	100	96,86
			Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayarkan	2	jenis	424620000	4	272.159.349	4	263.612.998	100	96,86
			Kegiatan Penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis sarana Dan prasarana yang tersedia	49	jenis	1413701615	1005	724.921.365,00	1005	704.890.866,00	100	97,24
			Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	8	Unit		8	100.185.300	8	88.097.590	100	87,93

			Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	Unit	1.261.898.925	8	8		100	
			Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara (termasuk komputer,laptop, PC, printer Scanner , Kamera , Mesin Fax)	8	unit	51.343.572	8	48.898.640	46.660.400	100	95,42
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2	unit	1.049.268.150	2	98.980.000	98.483.076	100	99,5
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	7	jenis	186.900.000	7	476.857.425	471.649.800,00	100	98,91

Meningkatkan penerapan e governance	Dinas Kominfotik	Meningkatnya pelayanan e governance dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap masyarakat	Program Informasi dan Komunkasi Publik	Persentase PPID Aktif	98	%	1.819.206.848	98	100	102.04			
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyebarluasn informasi (diseminasi informasi melalui forum tatap muka				100	1.584.719.360,00	100	1.563.140.075	100	98,64
			Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah studio dan media informasi komunikasi	8	jenis	9.989.104	8	885.576.200	8	868.783.625	100	
		Jumlah kelompok Informasi Masyarakat yang terbina		10	media		11	11		100			
		Jumlah Publikasi Media Elektronik, media non elektronik		4000	kali		38	38		100			

			Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah penyebarluasan informasi (diseminasi informasi) melalui forum tatap muka	2	pengaduan	820.296.488	120	699.143.160	120	694.356.450	100	99,32
				Jumlah permohonan informasi dan pengaduan yang		informasi		5		5		100	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang terintegrasi	44,44	%	5.991.157.228	44,44	9.373.496.277	89,18	8.793.472.845	200,6	93,81
			Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah Kota Blitar		kelompok		12	6.166.408.427	12	6.021.088.890	100	97,64

			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase aplikasi yang terintegrasi		%	2806892130		2.666.000.000	30	2.254.740.455	100	84,57
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi E-Government ang terintegrasi	3	Jenis	729.753.780	6	520.924.650	6	500.090.300	100	96
				Jumlah Aplikasi smart City terbangun	2	Aplikasa		2		2		100	
				Jumlah dokumen kajian Audit-SI Tersusun	1	aplikasi		1		1		100	
				Jumlah Pembangunan Aplikasi Pelayanan Publik	1	kali		2		2		100	
				Jumlah Sosialisasi		bln		12		12		100	



				Aplikasi E-Govt Terlaksana									
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Sosialisasi Aplikasi SmartCity terlaksana		kali		1	4.772.200	1	4.633.800	100	97,1
				Tersedianya Layanan Sistem Emergency Call Center 112	12		kali		1		1		100
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan TI	30	orang		30	15.391.000	30	12.919.400	100	83,94
				Jumlah Sosialisasi Aplikasi e-Govt terlaksana	1								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan data Informasi Statistik Sektoral	100	%	379.354.091	80	332.194.110	91.60	330.936.803	114,5	91.60
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah data Statistik yang tersedia	400	Elemen data	379.354.091	400	332.194.110	400	330.936.803	100	99,62

			Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan diseminasi data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Analisa data Statistik	1	dokumen	379.354.091	3		3		100	99,62
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase dokumen dan sarana komunikasi Pemerintah yang	100	%		100	219.385.490	100	206.097.260,00	100	93,94
			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dikirim dan diterima serta diamankan	1	dokumen	250.118.132	1	219.385.490	1	206.097.260,00	100	93,94
			Penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan Layanan keamanan informasi yang terverifikasi	60	%	250.118.132	100	219.385.490	100	206.097.260,00	100	93,94

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021 Kota Blitar, maka pencapaian secara umum telah terealisasi 100% meskipun ada beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, disebabkan antara lain :

1. Adanya perubahan rencana anggaran yang semula untuk nara sumber guna penyusunan rentra dialihkan untuk kegiatan penekanan tugas ASN diakhir Tahun
2. Anggarannya dialihkan /dipergunakan untuk penanganan Covid 19
3. Adanya Efisiensi Anggaran
4. Optimalisasi peranan PPID dan ULPIM serta Peningkatan fungsi KIM dan Telecenter
5. Sosialisasi Perwali maupun Masterplan SPBE perlu dilakukan secara bertahap kepada OPD sesuai hasil penilaian moneyv oleh Kemenpan RB
6. Sosialisasi pemanfaatan domain dan peningkatan kualitas layanan domain blitarkota.go.id
7. Peningkatan kualitas perangkat dan layanan komunikasi intra pemerintah daerah
8. Pemenuhan kebutuhan bandwidth melalui Kerjasama dengan Provider
9. Sistem pertukaran data (webservices) pada aplikasi layanan publik wajib disediakan oleh pemilik aplikasi agar dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain, khususnya aplikasi berbasis mobile
10. Kerja sama dan komitmen semua OPD dalam menyediakan data statistik sektoral yang valid dan akurat serta didukung dengan regulasi yang jelas
11. Pemenuhan standart sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar beserta target dan capaian realisasinya tahun 2021 dirinci seperti hasil analisis sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Penerapan E Governance

1. Indikator sasaran 1 :

Tabel 2.1

Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2021	Realisasi 2021	%
Persentase ketersediaan layanan aplikasi e Gov pada perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang tersedia}}{\text{Jumlah aplikasi yang dibutuhkan}}$	44,44%	89,18%	200.6%

Analisis :

Indikator sasaran 1 pada tahun 2021 telah terealisasi 89,18% dari target sebesar 44,44%. Pada indikator ini dapat dikatakan **berhasil/ tercapai** karena telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Target indikator kinerja ini dihitung dengan cara mencari Jumlah aplikasi yang tersedia / jumlah aplikasi yang dibutuhkan x 100%, dimana untuk tahun 2021 Target yang ditentukan adalah 44,44% artinya ada 33 Aplikasi yang terbangun sampai akhir tahun 2021 dan dapat dipergunakan berbasis web. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata terdapat peningkatan yang signifikan dari target yang ada hal ini dikarenakan ada beberapa Aplikasi yang dikembangkan oleh OPD dengan tetap terkoordinasi dengan Dinas Kominfo, serta pemanfaatan aplikasi berbagi pakai dari Pusat. Realisasi sebesar 89,18% atau penambahan sekitar 17 Aplikasi ini tidak lepas dari koordinasi dengan Pengguna Aplikasi yaitu OPD, serta pemanfaatan jaringan tertutup (Intranet) melalui Fiber optic sehingga aplikasi yang dibangun dimanfaatkan secara penuh tanpa ada kendala jaringan. Hingga akhir tahun 2021 telah terealisasi layanan publik dan layanan pemerintahan sebanyak 33 buah atau 83,78 % dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Jumlah Sistem Informasi sampai dengan Tahun 2021

NO	SISTEM INFORMASI	TERSEDIA
		2021
1	Office Automation (Modul Dokumen Elektronik)	1
2	Portal Pemerintah Kota	1
3	SI Eksekutif	1
4	SI Evaluasi dan Info Pembangunan	1
5	SI Geografis	1
6	SI Jaring Pengaman Sosial	1
7	SI Kas dan Perbendaharaan Daerah	1
8	SI Katalog Hukum dan Perundang-undangan	1
9	SI Kepegawaian Daerah	1
10	SI Kependudukan	1
11	SI Ketenagakerjaan	-
12	SI Kesehatan	1
13	SI Ketentraman dan Ketertiban Umum	1
14	SI Keuangan Daerah	1
15	SI Lingkungan Hidup dan Sarana Umum	1
16	SI Manajemen Pelaporan Pemerintah	1
17	SI Pariwisata	1
18	SI Pelayanan Umum Terpadu	1
19	SI Pendidikan	1
20	SI Pengadaan Barang dan Jasa	1
21	SI Pengadaan dan Pengelolaan Barang Daerah	1
22	SI Pengairan	1
23	SI Pengawasan Daerah	1
24	SI Pengelolaan Barang Daerah	1
25	SI Pengelolaan dan Monitoring Proyek	1
26	SI Pengelolaan Pasar	1
27	SI Pengelolaan Pendapatan Daerah	1
28	SI Perencanaan Pembangunan Daerah	1
29	SI Perhubungan	1

30	SI Perhutanan dan Pertanian	-
31	SI Perikanan dan Kelautan	-
32	SI Perindustrian dan Perdagangan	1
33	SI Perpustakaan	1
34	SI Pertambangan dan Energi	-
35	SI Peternakan	1
36	SI Potensi Daerah	1
37	SI Sosial	1
	JUMLAH	33

Keberhasilan ini ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- pembuatan aplikasi sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada rencana induk pengembangan e government Pemerintah Kota Blitar.
- Komitmen pimpinan perangkat daerah untuk mewujudkan indikator sasaran yang telah ditetapkan

2. Indikator sasaran 2 :

Tabel 2.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 2 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2021	Realisasi 2021	%
Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Jumlah informasi pemerintah yang terakses oleh masyarakat / Jumlah informasi pemerintah yang terpublikasi	98%	100%	102%

Analisis :

Indikator sasaran 2 pada tahun 2021 telah terealisasi 100 % dari target sebesar 98 %. Pada indikator ini dapat dikatakan berhasil/ tercapai karena telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Dari total informasi pemerintah yang terpublikasi sebanyak 4940 telah terakses oleh masyarakat sebanyak 4940. Pengukuran realisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah informasi pemerintah yang : pada website blitarkota.go.id terakses oleh masyarakat sebanyak 2773 dan website PPID sebanyak 1023
Youtube Resmi Pemkot : 752
2. Informasi pemerintah yang : pada website blitarkota.go.id terpublikasi sebanyak 2773 dan website PPID sebanyak 1023
Youtube Resmi Pemkot : 752

Keberhasilan ini ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- Sudah adanya peraturan perundangan yang menaungi pengelolaan PPID dan ULPIM/LAPOR SP4N
- Sarana dan prasarana yang memadai dalam pemenuhan layanan informasi publik kepada masyarakat
- Sudah terbentuknya kelembagaan PPID pada seluruh perangkat daerah sehingga memudahkan pemenuhan layanan informasi publik
- Adanya SOP yang jelas dalam pengelolaan permintaan informasi
- Kapasitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan permintaan informasi.

3. Indikator sasaran 3 :

Tabel 2.3

Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2021	Realisasi 2021	%
Persentase data statistik yang terlayani melalui e governance	Jumlah data statistik yang terpublikasi / Jumlah data statistik yang dimiliki	80%	91,60%	114,5 %

Analisis :

Indikator sasaran 3 pada tahun 2021 telah terealisasi 91,60% dari target sebesar 80%. Pada indikator ini dapat dikatakan berhasil/ tercapai karena telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada aplikasi data telah ditetapkan jenis data yang akan dipublikasikan dari 30 perangkat daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kota Blitar. Pada tahun 2021 ini telah terkumpul data dari 28 perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Publikasi Data Tahun 2021

NO	INSTANSI/ PERANGKAT DAERAH	PUBLIKASI DATA	
		Sudah	Belum
1	Dinas Perumahan Rakyat	v	
2	Dinas Koperasi dan UKM	v	
3	Sekretariat DPRD	v	
4	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	v	
5	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	v	
6	Badan Kepegawaian Daerah	v	
7	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar	v	
8	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Blitar	v	
9	Inspektorat Daerah	v	
10	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan PBD		v
11	Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	v	
12	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	v	
13	Satuan Polisi Pamong Praja	v	
14	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	v	
15	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	v	
16	Dinas Kesehatan	v	
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB	v	
18	Dinas Sosial	v	
19	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP	v	
20	Dinas Pendidikan	v	
21	Dinas Lingkungan Hidup	v	
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	v	
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	v	
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	v	

25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		v
26	Dinas Perhubungan	v	
27	Kecamatan Sukorejo	v	
28	Kecamatan Kepanjenkidul	v	
29	Kecamatan Sananwetan	v	
30	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	v	

Keberhasilan ini ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- Data statistik sektoral dapat dikumpulkan sesuai target rencana kinerja tahunan sebagai bank data Kota Blitar;
- Adanya sarana prasarana yang memadai dalam mempublikasikan data statistik sektoral;
- Perlu meningkatkan koordinasi dan pro aktif dengan OPD terkait di OPD yang belum mengumpulkan data statistik sektoral

2. Indikator sasaran 4 :

Tabel 2.4
Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 4 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target 2021	Realisasi 2021	%
Persentase informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi	Jumlah informasi milik pemerintah atau negara yang diamankan / Jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan	100%	100%	100%

Analisis :

Indikator sasaran 4 pada tahun 2021 telah terealisasi 100% dari target sebesar 100%. Pada indikator ini dapat dikatakan sangat / tercapai karena telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari 1.124 yang terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keputusan, Surat Perintah, Surat Pengantar, Surat Edaran, Surat Undangan, milik pemerintah yang dikirim/ diterima telah dapat diamankan seluruhnya. Hal ini dapat dilihat dari media/ sarana pengiriman informasi yang telah tervalidasi keamanan informasinya.

Keberhasilan ini ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :



- Sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan keamanan informasi dari dokumen maupun informasi yang dikirim/ diterima;
- Penerapan surat dinas melalui sistem surel kepada seluruh OPD;
- Sosialisasi Keamanan Informasi di lingkup OPD
- Kapasitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan informasi;

Keberhasilan / kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

Tabel Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya Penerapan E Governance	Persentase ketersediaan layanan aplikasi e Gov pada perangkat daerah	200.6%	v			
	Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	102%	v			
	Persentase data statistik yang terlayani melalui e governance	114,5 %	v			
	Persentase informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi	100%	v			
Rata – rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis		129,3%	SANGAT BERHASIL			

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja dari masing-masing indikator kinerja utama yang telah dijabarkan sampai pada program dan kegiatan, dapat diperoleh gambaran bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada 2021 masuk ke dalam kategori pertama atau “sangat berhasil” dengan nilai rata rata capaian **129,3% (seratus tiga puluh koma delapan puluh tujuh persen).**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Berdasarkan hasil kinerja pada 4 sasaran yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya dapat di jelaskan untuk pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar, dijabarkan ke dalam Tabel berikut:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran/ Kinerja Utama/ Program	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target %	Realisasi %	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Meningkatnya Penerapan EGovernance	Persentase ketersediaan layanan aplikasi e Gov pada perangkat daerah	44,44%	89,18%	200.6%	9.373.496.277	8.793.472.845	93,81%
	Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	98%	100%	102%	1.584.179.360	1.563.140.075	98,67%
	Persentase data statistik yang terlayani melalui e governance	80%	91,60%	114,5 %	332.194.110	330.936.803	99,62%
	Persentase informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi	100%	100%	100%	219.385.490	206.097.260	93,94%
Rata – rata Capaian Kinerja dan Anggaran				129,3%			

Sedangkan untuk Efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar ditunjukkan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama / Program	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Penerapan EGovernance	Persentase ketersediaan layanan aplikasi e Gov pada perangkat daerah	200.6%	93,81%	2,14%
2.		Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	102%	98,67%	1.03%
3.		Persentase data statistik yang terlayani melalui e governance	114,5 %	99,62%	1.15 %

4.		Persentase informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi	100%	93,94%	1.06%
----	--	---	------	--------	-------

Selanjutnya untuk menilai Keberhasilan / kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 ditunjukkan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Tabel Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya Penerapan E Governance	Persentase ketersediaan layanan aplikasi e Gov pada perangkat daerah	200.6%	v			
	Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	102%	v			
	Persentase data statistik yang terlayani melalui e governance	114,5 %	v			
	Persentase informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi	100%	v			
Rata – rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis		129.3%	SANGAT BERHASIL			

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan organisasi atau berasal dari dalam OPD, sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang berkaitan dengan dinamika Nasional, Provinsi dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi yang di masa mendatang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru.

Berikut adalah Tabel identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Tabel 2.9
Identifikasi Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

No	Tugas Pokok / Fungsi	Permasalahan
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.	
	Untuk melaksanakan tugas tersebut ada beberapa Fungsi sebagai berikut :	
1	pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;	Pemantauan opini dan aspirasi Publik di media mengenai isu yang berkembang
2	pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;	Masih belum optimalnya Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah
3	pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;	Masih belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik di daerah
4	layanan hubungan media;	Kurangnya kerja sama dengan berbagai media massa di daerah

5	penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;	Kurangnya tenaga yang mempunyai keahlian dibidang komunikasi publik
6	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas	- Belum adanya produk hukum daerah terkait implementasi Smart City Belum dilakukan sinkronisasi roadmap Smart City Kota Blitar dengan Smart Province Jawa Timur.
7	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah	- Pembinaan penggiat TIK masih sebatas kepada Relawan TIK, belum dilakukan kepada komunitas TIK lain seperti Youtuber, Blogger, Gradasi (Generasi Digital Indonesia), dan lainnya. - Pelatihan TIK belum memberikan dampak peningkatan jumlah personil yang tergabung didalam komunitas TIK
8	Pengembangan Aplikasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	Pembangunan aplikasi layanan publik berbasis <i>mobile</i> masih minim
9	Penatalaksanaan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Masih kurangnya pemahaman OPD terkait SPBE, sehingga pelaksanaan SPBE hanya bertumpu pada Diskominfo atau OPD tertentu
10	Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet	Belum terpenuhinya kebutuhan akan bandwidth internet yang memadai bagi perangkat RT dan RW
11		Belum terpenuhinya penyediaan Fasilitas Free HostSpot di Fasilitas Umum
12		Kurang Optimalnya pemanfaatan jaringan intra pemerintah di tiap Perangkat Daerah
13	Pemberian bimbingan	Masih terdapat perangkat daerah yang menggunakan domain selain blitarkota.go.id

	teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK;	
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informatika dalam pelaksanaan komunikasi intra pemerintah
14	Pengelolaan data statistik sektoral yang valid dan akurat	Kurangnya kesadaran dan komitmen OPD (selaku produsen data) dalam menyediakan data statistik sektoral yang valid dan akurat

Tabel 2.10
Identifikasi Isu Strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar

No	Isu Strategis			
	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Blitar	Dinas Kominfo dan Statistik
1	Menuju era digitalisasi <i>broadband</i> dari sistem analog	Implementasi <i>e-Government</i> di Jawa Timur belum optimal	Pengelolaan kearsipan dalam bentuk EGovernment	Terwujudnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi
2	Keterbukaan informasi	Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi	Kemitraan dan partisipasi masyarakat untuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah	Optimalisasi peranan PPID dan ULPIM serta Peningkatan fungsi KIM dan Telecenter
3	Masalah keamanan Informasi	Pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam penyebarluasan informasi	Teknologi Informasi mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan kesadaran terhadap keamanan data dan informasi

Berdasarkan hasil identifikasi Isu strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar perlu diperhatikan beberapa hal pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, yaitu :

1. Dalam penyelenggaraan program/kegiatan, hendaknya berpegangan pada program, karakter masyarakat serta keselarasan dengan program/kegiatan pada OPD lain sehingga dapat mendukung pelaksanaan visi misi Pemerintah Kota Blitar.
2. Dalam penyelenggaraan program/kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik harus selaras dengan kebijakan nasional, Provinsi

Jawa Timur serta Pemerintah Kota Blitar sehingga konektivitas program dari pusat sampai tingkat OPD dapat berjalan optimal.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada rentang waktu 2016-2021 isu-isu strategisnya adalah :

1. Terwujudnya layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi
Menerjemahkan agenda prioritas nasional nawacita poin ke dua, yaitu “Membuat Pemerintah Tidak Absen Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya” ke dalam rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2016 - 2021. Implementasi dari agenda ini diwujudkan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik pada Kegiatan Pengelolaan Aplikasi sistem informasi yang memfasilitasi pembuatan aplikasi sistem informasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi. Sehingga diharapkan dengan dukungan dari layanan informasi layanan informasi pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi ini tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya bisa diwujudkan.
2. Optimalisasi peranan PPID dan ULPIM
Sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 25 Tahun 2009, telah membuka kran keterbukaan informasi publik serta optimalisasi pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua aturan tersebut, maka pembentukan PPID dan ULPIM sangat tepat. Karena keduanya selain sebagai penyedia informasi publik juga sebagai penampung aduan layanan untuk perbaikan ke depan.
3. Peningkatan fungsi KIM dan Telecenter
Pelibatan masyarakat dalam penyebarluasan kebijakan pemerintah seperti Kelompencapir pada masa orde baru sangat efisien. Sesuai perkembangan jaman, model kelompencapir bermetamorfosis menjadi Kelompok informasi Masyarakat (KIM). Adanya kelompok ini dapat mengintensifkan tersampainya informasi kepada masyarakat. Selain KIM saat ini juga terdapat Telecenter yang menjadi wadah bagi kelompok masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi baik secara vertikal maupun horizontal. Pemanfaatan telecenter ini lebih mengedepankan penggunaan Teknologi Informasi dalam proses penyebarluasan informasi.
4. Pembangunan data sektoral yang akurat dan pelayanan keamanan informasi.
Data merupakan faktor penentu dalam perencanaan pembangunan sehingga perlu mendapatkan perhatian yang khusus dan dalam pengelolaan data tersebut sudah seharusnya memanfaatkan teknologi informasi dengan disertai pengamanan yang benar-benar handal sehingga data dan informasi tersebut tidak mudah diambil oleh pihak yang tidak berkepentingan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Pada tahun 2022 tema pembangunan yang harus dilaksanakan adalah “Pemantapan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Didukung Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas” yang didukung oleh 6 prioritas pembangunan.

Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2022, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar mengacu pada prioritas 4 “penguatan produktivitas dan daya saing daerah yang berorientasi pada ekonomi kreatif dan inovatif” dimana e governance menjadi salah satu program prioritas.

Sasaran target pada Rencana Kerja tahun 2022 ini juga disesuaikan dengan target pada Rencana Strategis dinas komunikasi, informatika dan statistik tahun 2016 – 2021.

Pak mohon untuk 2021, dibantu dijabarkan

Tabel 2.13
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Rancangan Awal							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kebutuhan dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		Kota Blitar	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,31			Kota Blitar	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,31			
		Kota Blitar	Hasil Monev PPID	Persen	72,6			Kota Blitar	Hasil Monev PPID	Persen	72,6			
	Program Informasi dan komunikasi publik	Kota Blitar	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan	persen	83	2.564.813.096	Program Informasi dan komunikasi publik	Kota Blitar	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan	persen	83	2.714.813.096		
		Kota Blitar	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	persen	60			Kota Blitar	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	persen	60			

	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik			34%	2.564.813.096	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik			34%	2.714.813.096	
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	dokumen		3	27.938.900	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	dokumen		3	27.938.900	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	dokumen		5	16.959.400	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	dokumen		5	16.959.400	
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen		12	6.247.000	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen		12	6.247.000	

	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen	500	174.116.500	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen	500	324.116.500	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	5.636.300	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30		
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	11	796.158.900	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	11	796.158.900	
	Pelayanan Informasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	120	609.320.700	Pelayanan Informasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	120	609.320.700	
	Layanan Hubungan Media	Kota Blitar	Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	995	767.795.996	Layanan Hubungan Media	Kota Blitar	Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	995	767.795.996	
	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	dokumen	12	130.662.500	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	dokumen	12	130.662.500	

	Manajemen Komunikasi Krisis	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	dokumen		1	11.694.300	Manajemen Komunikasi Krisis	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	dokumen	1	11.694.300	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang		30	5.636.300	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Blitar	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	30	5.636.300	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	dokumen		80	18.322.600	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	dokumen	80	18.322.600	
		Kota Blitar	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	Indeks		3,91			Kota Blitar	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	Indeks	3,91		
	Program aplikasi informatika	Kota Blitar	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	Persen	45,69	86,35	7.213.911.948	Program aplikasi informatika	Kota Blitar	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	Persen	86,35	7.429.663.511	

Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan			100%	6.033.779.702	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan			100 %	6.033.727.718
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kota	Kota Blitar	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	domain		6	21.000.000	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kota	Kota Blitar	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	domain		6	6.000.000
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		2	56.307.600	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		2	41.307.600

	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	10	5.986.472.102	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	10	5.986.472.118
	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik		90,50 %	1.180.132.246	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik		90,50 %	1.395.935.793
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	81.758.700	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	81.758.700
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	dokumen	1	1.944.000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	dokumen	1	1.944.000
		Kota Blitar		unit	1	104.785.800		Kota Blitar		unit	1	54.765.800

	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	dokumen		300	710.192.176	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	dokumen	300	329.998.723	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	dokumen				Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	dokumen			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	perangkat daerah			9.361.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	perangkat daerah		9.361.000	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Blitar	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit			500.248.270	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Blitar	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit		5.122.489.270	

	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Blitar	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	layanan				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Blitar	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	layanan		1.644.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen		1	4.316.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	4.316.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen		21	86.367.500	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	21	262.418.800	
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	dokumen		1		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	dokumen	1	39.948.700	

		Kota Blitar	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Persen		96			Kota Blitar	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Persen	96		
	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Kota Blitar	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	Persen	NA	93,43	427.353.510	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Kota Blitar	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	Persen	93,43	427.353.510	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Persen		100	350.971.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Persen	100	427.353.510	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen		100	350.971.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	100	350.971.000	

	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Kota Blitar	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang		10	18631710	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Kota Blitar	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	10	18631710	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Blitar	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen		4	25.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Blitar	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	4	25.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	orang		4	3.288.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	orang	4	3.288.000	
	Pengembangan Infrastruktur	Kota Blitar	Jumlah Infrastruktur Statistik	unit		1	25.000.000	Pengembangan Infrastruktur	Kota Blitar	Jumlah Infrastruktur Statistik	unit	1	25.000.000	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Blitar	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen		4	4.462.800	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Blitar	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	4	4.462.800	

		Kota Blitar	Indeks KAMI	Indeks	38,76	358.315.580		Kota Blitar	Indeks KAMI	Indeks	38,76	358.315.370	
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Kota Blitar	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	38,76	230.219.540	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Kota Blitar	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	38,76	230.219.330	
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/Kota				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/Kota				
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	dokumen	2	123.773.640	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	dokumen	2	123.773.580	

	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan		1	51.442.820	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1	51.442.820	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan		1	35.782.340	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	1	35.782.240	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	perangkat daerah			19.220.740	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	perangkat daerah		19.220.690	

	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	Persen		25	128096040	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	Persen	25	128096040	
	Operasionalisasi Jaring komunikasi sandi Pememerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			40	128.096.040	Operasionalisasi Jaring komunikasi sandi Pememerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		40	128.096.040	
2		Kota Blitar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	A			Kota Blitar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	B a i k	84	6.884.694.624	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84	6488378124	

	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	persen	100	41668300	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	persen	100	51668300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disko minfot ik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokume n	11	16.668.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfot ik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokume n	11	16.668.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	7	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	7	25.000.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan		1	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Persen		100	4.137.162.900	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Persen	100	3.696.096.400	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	laporan		2	4.129.463.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	laporan	2	3.688.396.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan		4	7.699.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	4	7.699.900	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	persen		100	1.283.354.100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	persen	100	1.283.354.100	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket		51	25.304.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	51	25.304.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		34	1.258.050.100	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	34	1.258.050.100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persen		100	374.953.724	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persen	100	559.685.724	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket		16	16.990.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	16	16.990.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket			
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket		20	32.349.324	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	20	32.349.324	

	Penyediaan bahan Logistik kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		26	89.896.400	Penyediaan bahan Logistik kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	26	294.646.400
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket		6	13.850.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	13.850.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen		3	9.750.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	3	9.750.000
	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		37	212.100.000	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	37	192.100.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Persen		100	408610000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Persen	100	408610000

	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		4	408.610.000	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	408.610.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Persen		100	338.963.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Persen	100	338.963.600	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		16	121.602.800	Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16	121.602.800	

							Dinas Operasional atau lapangan						
Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	8	49.380.800	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	8	49.380.800		
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	101.130.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	101.130.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	66.850.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	66.850.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar			100%	150.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar			100%	150.000.000		

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	7	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	7	150.000.000
--	--	-------------	--	------	---	-------------	--	-------------	--	------	---	-------------



2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil sinkronisasi rumusan rencana kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan hasil Musrenbang RKPD Kota Blitar di Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar mengakomodasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan pemangku kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun rekapitulasi usulan program/ kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Kota Blitar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Cat.
1	2	3	4	5	6
1	Program Penyelenggaraan E-Gov				
	Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur teknologi dan komunikasi	di tiga kecamatan (Sukorejo, Kepanjenkidul dan Sananwetan)	Pengadaan CCTV	jumlah titik dan pagu menyesuaikan	
	Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi	DSP Kec. Kepanjenkidul - Warga kelurahan tanggung	Pelatihan IT (Jenis Pelatihan yaitu : - E commerce - Internet marketing – Blog)	20 orang	
		di tiga kecamatan (Sukorejo, Kepanjenkidul dan Sananwetan)	Pengadaan sarana wifi	jumlah titik dan pagu menyesuaikan	

Dari sisi program usulan tersebut diatas. memang masuk dalam rencana program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Kerja maupun

rencana strategis dari Dinas Kominfo dan Statistik. namun demikian didalam proses penganggarannya akan dilihat dari ketersediaan dan kemampuan dari anggaran yang ada. Sedangkan untuk usulan yang masuk dalam kegiatan yang sudah direncanakan maka tetap menjadi prioritas kegiatan yang ada di bidang – bidang.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah dilakukan pembagian urusan pemerintahan menjadi 3 yaitu urusan absolute, urusan konkuren dan urusan umum.

Untuk klasifikasi konkuren pemilahan urusan adalah sebagai berikut :

- a. Dibagi antara pemerintah pusat. daerah provinsi. daerah kabupaten/ kota.
- b. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan pada pemerintah daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota dapat diuraikan sebagaimana matriks berikut :

Tabel 3.1
Pembagian Urusan Pemerintah

NO	URUSAN/ SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	Sub Urusan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Pusat serta informasi strategis nasional dan internasional	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi.	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
	Sub Urusan Aplikasi Informatika	a. Penetapan nama domain dan sub domain bagi instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. b. Pengelolaan nama domain instansi	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi. b. pengelolaan e-government di lingkup	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan e-government di

		penyelenggara negara. c. Pengelolaan e-government nasional.	Pemerintah Daerah provinsi.	lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
	Statistik Sektoral	---	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Pusat b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar kementerian/ lembaga. antara Pemerintah Pusat dengan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota. c. Pengelolaan kunci sandi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/ kota

Dalam perencanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 di urusan Komunikasi. Informatika. Urusan Statistik dan urusan Persandian agar searah dan sejalan antara Pemerintah Pusat. Provinsi dan Kabupaten/Kota maka tidak boleh lepas atau meninggalkan program Prioritas Nasional.

Program prioritas Nasional yang menyangkut Urusan Komunikasi dan Informatika masuk pada “ **Prioritas Nasional 2** : Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman.”

Dimana dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sebagai berikut :

a. mengembangkan telekomunikasi dan informatika berupa pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional kedua, dan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

b. peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing;

Pada **Prioritas Nasional 5** : Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu ada beberapa arah kebijakan yang perlu dilakukan menyangkut urusan persandian, komunikasi dan informatika antara lain pada huruf a) meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber, dengan arah meningkatkan pengamanan aktivitas siber; dan pada huruf d) meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi arahnya pada point 3) meningkatkan pelaksanaan e-Government;

Selanjutnya pada Rencana Arah Kebijakan Pembangunan yang mendukung prioritas nasional selain SPM, terdapat beberapa urusan pelayanan wajib non dasar dan pilihan serta penunjang urusan di daerah yang mendukung prioritas nasional sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi Dinas terdapat pada point j, o dan p sebagai berikut:

j. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mendukung prioritas nasional kedua yaitu : pengu- rangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman maka perlu adanya upaya pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Daerah, pengelolaan dan penyediaan informasi melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi, serta pembinaan dan pengembangan e-government. Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan daerah yang perlu diperhatikan adalah peminan dan pengembangan kebijakan publik nasional serta pembinaan SDM untuk pelaksanaan kebijakan komunikasi daerah. Kemudian untuk tersedianya konten informasi publik yang beragam dan berkualitas, bersifat mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat dalam kerangka NKRI maka perlu dilakukan upaya pengelolaan dan penyediaan Informasi melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi di daerah. Selanjutnya untuk menunjang adanya e-goverment agar

tersedianya layanan e-Government yang terintegrasi dengan indeks e-Government mencapai nilai 3.4 (skala 4.0) maka dilakukan dengan upaya pembinaan dan pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah. Dengan ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 hal-hal yang perlu diselaraskan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) pembinaan SDM Komunikasi;
- 2) pengelolaan informasi dan manajemen krisis
- 3) penyelenggaraan dan penyediaan informasi;
- 4) penyediaan media komunikasi;
- 5) penyediaan konten dan pengelolaan media;
- 6) pembinaan hubungan media;
- 7) pengelolaan nama domain di lingkup pemerintah daerah untuk instansi/lembaga pemda, kegiatan daerah, dan pelayanan publik yang memanfaatkan domain instansi penyelenggara negara;
- 8) meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan TIK; dan
- 9) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK.

o. Statistik

Data merupakan salah satu hal yang penting dalam pembangunan, menyadari hal itu data merupakan sumber informasi yang sebagai pemberi arahan dan memberikan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah. Dengan kondisi Indonesia yang terpisah-pisah antar daerah dan antar pulau maka data-data Statistik yang harus tersedia yaitu data Sektor rawan bencana, **Statistik sektoral tentang pendidikan** (jumlah lulusan pendidikan tinggi menurut desa, jumlah industri pengolahan Sumber Daya Alam (karet, batubara, kayu, jumlah jaringan infrastruktur Energi Listrik, Air, Panjang Jalan Negara, Sarana Telekomunikasi Terpadu (BTS) per desa.

Selain itu data yang diperlukan juga terkait kriminalitas (jumlah eks-narapidana di Desa, jumlah sosialisasi anti korupsi di Desa, jumlah pengguna narkoba di Desa, kemudian data sektoral tentang kesehatan, data yang komprehensif sarana untuk membangkitkan ekonomi wilayah, tersedianya data pangan dan pariwisata, data statistik sektoral kepramukaan dan sebagainya. Dengan ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) jumlah bangunan perumahan yang rawan bencana;
- 2) jumlah fasilitas umum (sekolah, kantor kepala desa, dan lain- lain) yang terdampak jika bencana;

- 3) rencana dan realisasi penggunaan dana desa;
- 4) jumlah perusahaan industri menurut kategori (rumah tangga, kecil, sedang dan besar);
- 5) jumlah usaha angkutan desa (perusahaan dan perorangan);
- 6) jumlah pelanggan PDAM di desa;
- 7) jumlah eks-narapidana di desa;

p. Persandian

Dalam rangka meningkatkan pelayanan persandian untuk pengaman informasi pemerintah daerah, maka dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 tentang Informasi Yang Dikecualikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan ini maka upaya pelayanan persandian dilakukan dengan pemantapan efektivitas penyelenggaraan persandian daerah melalui peningkatan profesionalisme SDM dan modernisasi peralatan, kemudian perlu dilakukan peningkatan operasionalisasi peralatan persandian. Hal ini perlu dilakukan agar penyelenggaraan operasional persandian dalam rangka pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah, Peningkatan kompetensi SDM persandian, Penyediaan Kebutuhan peralatan sandi dan dan alat pendukung utama (APU) persandian. Dengan demikian maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 pemerintah daerah memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) fasilitasi pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah melalui perangkat persandian;
- 2) pemanfaatan sertifikat elektronik untuk document *signing* pada informasi milik pemerintah daerah;
- 3) perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan persandian dengan mengacu NSPK di bidang persandian yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara/ Badan Siber dan Sandi Negara;
- 4) fasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi di perangkat daerah;
- 5) fasilitasi kegiatan sterilisasi / kontra penginderaan pada aset perangkat daerah;
- 6) fasilitasi kegiatan pengamanan sinyal melalui jammer pada kegiatan strategis;

- 7) fasilitasi penilaian keamanan sistem informasi milik perangkat daerah melalui kegiatan IT security assessment;
- 8) sosialisasi pemanfaatan fungsi persandian dalam rangka pengamanan informasi pada pemerintah daerah kepada perangkat daerah;
- 9) peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM di bidang persandian melalui keikutsertaan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang Persandian;
- 10) penetapan pola hubungan komunikasi sandi di lingkungan pemerintah daerah;
- 11) penyediaan kebutuhan peralatan sandi dan dan Alat Pendukung Utama (APU) persandian dengan mengacu pada pola hubungan komunikasi sandi yang telah ditetapkan; dan
- 12) pengelolaan dan pemeliharaan materiil sandi, peralatan sandi dan Alat Pendukung Utama (APU) persandian serta jaring komunikasi sandi.

Bertitik tolak dari dasar tersebut diatas maka pada prioritas pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2022 yang berhubungan dengan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yaitu:

1. Keterbukaan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik maka pada tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar melalui PPID menitikberatkan pada upaya meminimalisir sengketa informasi. Hal ini sebagai indikator bahwa setiap permintaan dari masyarakat telah dipenuhi dan sebagai bukti bahwa telah dilaksanakannya transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

2. Diperlukan konsistensi dalam penyusunan DIP sehingga menunjang pelaksanaan meja layanan PPID
3. Perlunya pengoptimalan SDM PPID sehingga kinerja pelaksanaan PPID ditingkat kota maupun PPID pembantu dapat berjalan lancar
4. Pengintegrasian layanan pengaduan
5. Kebutuhan layanan publik dan layanan pemerintahan yang terintegrasi berbasis TIK (Teknologi, Informasi Dan Komunikasi) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Pengintegrasian layanan publik dan layanan pemerintahan ini di dukung oleh Program Penyelenggaraan e-Governance.
6. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota Blitar

7. Optimalisasi pemenuhan data statistik sektoral untuk mendukung terlaksananya a data
8. Optimalisasi sumberdaya keamanan informasi untuk mendukung penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Mengacu pada Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 serta dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2021, maka tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2021 diuraikan sebagaimana Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2022

TUJUAN				SASARAN			
Uraian	Indikator	Formulasi Penghitungan	Target 2022	Uraian	Indikator	Formulasi Penghitungan	Target 2022
Meningkatkan penerapan e governance	Persentase penerapan Layanan Pemerintahan dan layanan Publik berbasis TIK yang terintegrasi	(Jumlah layanan e governance yang tersedia / Jumlah layanan e governance yang dibutuhkan) x 100%	58%	Meningkatnya pelayanan e- governance	Persentase ketersediaan layanan aplikasi e-Gov pada OPD	(Jumlah aplikasi yang tersedia / jumlah aplikasi yang dibutuhkan) x 100%	40%
					Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	(Jumlah informasi pemerintah yang terakses oleh masyarakat/jumlah informasi pemerintah yang terpublikasi) x 100%	97%
					Persentase data statistik yang terlayani melalui e- governance	(Jumlah data statistik yang terpublikasi / jumlah data statistik yang dimiliki) x 100%	80%
					Persentase Informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi	(Jumlah informasi milik pemerintah atau negara yang diamankan /Jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan) x 100%	100%

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2022

4.1. Rencana Program Kerja Tahun 2022

Pada tahun anggaran tahun 2022 ini, program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar menyesuaikan dengan program/ kegiatan yang tertuang dalam perubahan RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar 2021 – 2026

Program yang disusun berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu. Ditetapkan untuk dipedomani, dijabarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pada tahun anggaran 2022 ini direncanakan terdapat 3 program administrasi umum dengan 8 kegiatan, dan 4 program dengan 9 kegiatan. Total kebutuhan dana / pagu indikatif pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. **26.270.115.044,00** (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Puluh Empat Rupiah). Adapun program / kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2022 diuraikan secara rinci pada Tabel 4.1 tentang Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021.

4.2. Rencana Kegiatan Tahun 2022

Rencana Kegiatan Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021 diuraikan seperti pada tabel 4. 1 berikut ini.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran		100%				100%	
2.10.2	10 01 01 01	Pengelolaan Administrasi Perkantoran							
		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	Kota Blitar	49 jenis	18.434.000			47 jenis	15.165.000
		Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	Kota Blitar	5 jenis				5 jenis	
		Jumlah lembar penggandaan	Kota Blitar	8708 lembar				7610 lembar	
		Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	Kota Blitar	3 bahan bacaan				3 bahan bacaan	
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Kota Blitar	1780 porsi				1665 porsi	
		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah		37 perjalanan dinas	148.043.962			32 perjalanan dinas	166.409.000
2.10.2	10 01 01 04	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran							

					Jumlah rekening yang terbayarkan	Kota Blitar	3 rekening		DAU		3 jenis	
					Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Kota Blitar	10 unit		DAU		10 unit	
					Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Kota Blitar	13 jenis		DAU		13 jenis	
					Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Kota Blitar	6 jenis				6 jenis	
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Kota Blitar	7 unit		DAU		7 unit	
					Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Kota Blitar	27 unit		DAU		27 unit	
					Jumlah jenis meubelair yang terpenuhi	Kota Blitar	1 jenis				1 jenis	
					Jumlah kendaraan dinas/operasional	Kota Blitar	2 unit				1 unit kendaraan roda 4	
					Jumlah bangunan kantor yang tersedia	Kota Blitar	2 unit				1 unit	
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Kota Blitar	10 unit		DAU		-	
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Kota Blitar	4 jenis		DAU		4 jenis	
					Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kota Blitar	4 jenis		DAU		4 jenis	
					Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Kota Blitar	2 unit		DAU		2 unit	
					Jumlah jenis meubelair yang terpelihara	Kota Blitar	2 unit		DAU		2 unit	
					Jumlah taman kantor yang terpelihara	Kota Blitar	1 unit				1 unit	

2.10.2	10	01	01	05	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun (termasuk SAKIP, PK, IKU, IKI, SOP, SPIP, LKJIP, IKM, LPPD dll)	Kota Blitar	9 jenis	16.503.300	DAU		9 jenis	16.503.300
2.10.2	10	01	01	06	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	Kota Blitar	4 jenis	4.992.800	DAU		4 jenis	7.040.000
2.10.2	10	01	02		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota		100%		DAU		100%	
2.10.2	10	01	02	01	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Kota Blitar	5 event	17.110.000	DAU		5 event	1.222.195.300
2.10.2	10	01	02	02	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan PD	Kota Blitar	3 jenis		DAU		3 jenis	
2.10.2	10	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan		100%		DAU		100%	
2.10.2	10	01	03	01	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu (termasuk RKA/DPA, Renja, Renstra dll)	Kota Blitar	6 jenis	28.162.500	DAU		6 jenis	23.999.900
2.10.2	10	01	05		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase ppid aktif		100%				100%	
2.10.2	10	01	05	01	Pengelolaan Komunikasi Publik	jumlah publikasi media elektronik, media non elektronik	Dinas Kominfo dan Statistik	4000 publikasi				4000 publikasi	
						jumlah kelompok informasi masyarakat yang terbina	Dinas Kominfo dan Statistik	12 kelompok				12 kelompok	
						jumlah alat studio dan media informasi komunikasi	Dinas Kominfo dan Statistik	12 jenis				12 jenis	

2.10.2	10	01	05	02	Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik	jumlah penyebarluasan informasi (diseminasi informasi) melalui forum tatap muka	Dinas Kominfo dan Statistik	2000 informasi	13.137.768			2000 informasi	13.137.768
2.10.2	10	01	05	03	Fasilitasi Operasional LPPL Radio Mahardhika FM	jumlah penyebarluasan informasi melalui radio	Dinas Kominfo dan Statistik	1675 informasi				1675 informasi	
2.10.2	10	01	05	04	Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	jumlah layanan informasi dan pengaduan yang terproses	Dinas Kominfo dan Statistik	550 layanan				550 layanan	
2.10.2	10	01	06		PROGRAM PENYELENGGARAAN E-GOVERNANCE	Persentase aplikasi yang terintegrasi	Kota Blitar	40%		DAU		40%	
2.10.2	10	01	06	02	Pengelolaan Infrastruktur teknologi dan komunikasi	jumlah sewa bandwidth internet, hosting, domain dan cpanel	Kota Blitar	12 bulan				12 bulan	
						jumlah jaringan fo		1 paket				1 paket	
						jumlah videowall		11 unit				11 unit	
						jumlah hotspot prorakyat		100 paket				100 paket	
						jumlah kamera 360		2 unit				-	
						jumlah cctv		1000 unit					
						jumlah video controller		1 unit					
						jumlah video conference		1 paket					
						jumlah server		2 unit					
						jumlah server proxy		1 unit					
2.10.2	10	01	06	03	Pengelolaan Aplikasi sistem informasi	jumlah pelatihan TI yang terlaksana		1 kali		DAU			
						jumlah komunitas startup digital terbentuk		1 kelompok					
						jumlah aplikasi pelayanan pemerintahan/publik terintegrasi		10 buah	95.526.720			10 buah	3.207.087.850

						jumlah aplikasi smart city yang terbangun		4 buah					
						Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah fasilitas komputer Bidding Room	6 buah		DAU			
							Jumlah Sosialisasi/Pelatihan LPSE yang terlaksana	1 kali					
2.10.2	14	01	05			PROGRAM PENGEMBANGAN DATA, INFORMASI DAN STATISTIK DAERAH	persentase ketersediaan data/ informasi statistik sektoral	100				100	
2.10.2	14	01	05	01	Penyusunan, Pengelolaan, updating dan analisis data statistik sektoral	jumlah data statistik yang tersedia	Kota Blitar	400 Elemen Data	332.194.110	DAU		400 Elemen Data	332.194.110
2.10.2	15	01	05			PROGRAM PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI MILIK PEMERINTAH ATAU NEGARA	persentase dokumen dan sarana komunikasi pemerintah yang diamankan	100					
2.10.2	15	01	05	01	Pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi	jumlah dokumen yang dikirim dan diterima serta diamankan	Kota Blitar	1.150 Dokumen	219.385.490	DAU		1.200 Dokumen	219.385.490